

Populisme: Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia

**Bachtiar Nur Budiman¹, Balilah Rizki Putriga², Bella Dewi Safitri³,
Vinona Julietta Imanuela⁴**

Diserahkan: 31 Januari 2022 | **Diterima:** 22 Juni 2022 | **Diterbitkan:** 6 Juli 2022

Abstrak

Suasana menjelang pemilihan umum 2024 telah dapat dirasakan dalam dinamika politik Indonesia. Salah satu fenomena yang kerap kali mewarnai jalannya pemilihan umum di Indonesia adalah keberadaan kandidat populis yang memanfaatkan narasi-narasi politik identitas untuk mengangkat namanya dalam ajang pemilihan. Artikel ini menganalisis keberadaan populisme sebagai konsekuensi dari stagnasi politik dan kurangnya pengawasan terhadap demokrasi di Indonesia. Dampak buruk dari populisme pernah terjadi di Amerika Serikat. Negara dengan demokrasi yang matang tersebut masih saja mudah terpecah akibat gaya kepemimpinan populis mantan presiden Donald Trump yang berakhir dengan penyerangan dan vandalisme di Gedung Capitol.

1 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
Email: bnbachtiar23@gmail.com.

2 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
Email: belladewi2112@gmail.com.

3 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
Email: balilahrp03@gmail.com.

4 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
Email: vinona0807@gmail.com.

Berdasarkan kasus tersebut, perlu dipahami bahwa populisme di Indonesia harus dipahami sebagai konsekuensi dari berbagai permasalahan sosial yang mendasar sehingga membutuhkan perubahan yang cepat. Kata stagnasi yang terdapat dalam judul menggambarkan bahwa berbagai permasalahan mendasar tersebut membutuhkan perubahan dan penyelesaian secara cepat. Hal ini membuat bermunculannya figur-figur populis yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh dukungan politik. Indonesia dengan segala kemajemukan identitas dan multikulturalismenya, ditambah dengan demokrasi yang belum mapan, sangat mudah untuk dipecah-belah melalui narasi kebencian dan politik identitas. Pemilihan umum 2024 berpotensi besar untuk kembali memunculkan kandidat populis yang lebih banyak, mengingat berbagai lembaga survei akuntabilitas calon presiden telah mengantongi sejumlah nama yang potensial untuk memainkan manuver politik yang serupa, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Artikel ini menggunakan kajian literatur untuk mengumpulkan data dan membahas permasalahan ini.

Kata kunci : *Populisme; Pemilihan Umum 2024; Demokrasi; Stagnasi Politik; Indonesia*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum 2014 dan 2019 menjadi saksi efektifnya strategi populisme dan politik identitas yang diterapkan di Indonesia. Identitas kelompok seakan menjadi fitur sekaligus peluang utama dan sangat mudah dimanipulasi oleh aktor politik yang hendak menaikkan popularitasnya. Dalam jangka panjang perjalanan politik suatu negara, hal ini dapat berdampak buruk bagi kondisi demokrasi dan ketertiban di tatanan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan analisa lebih lanjut dan mendalam mengenai fenomena politik ini.

Strategi politik yang digunakan dalam populisme memanfaatkan ide yang terkonstruksi oleh masyarakat, guna menciptakan sebuah narasi yang meruncing pada identitas pribadi aktor politik. Hal ini menandakan bahwa populisme yang ramai diperbincangkan di Indonesia bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, namun muncul dari asumsi negatif yang melandasi strategi pengumpulan dukungan bagi kandidat pemilihan umum. Asumsi inilah yang dimanfaatkan untuk membangun persepsi yang menguntungkan salah satu calon kandidat, dengan menyuarakan kekhawatiran atau bahkan menciptakan kekacauan untuk mewujudkan suasana yang “genting”, dimana rakyat menyadari betapa buruknya situasi yang terjadi.

Kandidat populis yang memanfaatkan keadaan genting tersebut akan membawa narasi yang menyatakan keadaan yang kurang ideal dalam sebuah negara, seperti banyaknya kasus penindasan dan ketidakadilan hingga marginalisasi beberapa kelompok identitas. Apabila calon kandidat tersebut telah berhasil membangun suasana yang buruk dan tidak diharapkan, kemudian akan dilanjutkan dengan menonjolkan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki dibandingkan calon kandidat yang lainnya. Calon kandidat ini akan mengonstruksi identitas politiknya menjadi “wakil dari suara rakyat”

(biasanya dari kaum menengah ke bawah) dengan memberikan narasi agresif untuk mengecam dan menentang norma atau kebiasaan, seperti menentang adanya kapitalisme atau pun oligarki yang dipandang sebagai sumber masalah. Jika situasi itu musnah dari negara tersebut, maka situasi politik di suatu negara akan cenderung stabil.

Populisme sebenarnya dapat dipahami dengan makna yang sederhana, yaitu konsekuensi dari menumpuknya berbagai permasalahan sosial politik yang semakin genting dan membutuhkan penyelesaian secara cepat. Dalam dinamika politik suatu negara, permasalahan yang tak kunjung selesai dapat menuai perdebatan dari berbagai kalangan. Tidak menutup kemungkinan, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa aktor untuk menciptakan situasi genting bahwa diperlukan adanya perubahan mendasar. Biasanya, peran ini dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pemimpin yang kharismatik serta membawa suara rakyat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, narasi yang dimainkan figur populis seperti ini kerap kali efektif dalam menciptakan perubahan opini masyarakat.

Di Indonesia, populisme dapat diamati dengan sangat jelas saat pemilu dilangsungkan. Peristiwa yang paling terlihat ialah pada Pemilu tahun 2014 dan 2019,

dengan Calon Presiden Prabowo Subianto melawan Joko Widodo pada periode I dan II jabatannya. Apabila dianalisis, kedua kandidat tersebut menggunakan strategi politik populis yang menggaris bawah kelemahan lawan politiknya sebagai usaha untuk meningkatkan pesimisme rakyat (Hilmy, 2020). Populisme semakin marak digunakan sebagai strategi politik pada Pemilu 2019, ditambah dengan kemunculan populisme Islam yang dimonitori oleh Front Pembela Islam (FPI) yang mendukung kandidat Prabowo Subianto dan sempat membawa isu-isu keagamaan (Perdana, 2019). Hal inilah yang kemudian meninggalkan dampak buruk dalam masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dampak buruk yang dimaksudkan ialah perpecahan dan eksklusivitas masyarakat yang dipicu oleh berbagai faktor pembeda, seperti agama, suku, ras, maupun golongan politik, bahkan setelah Pemilu berlangsung.

Berdasarkan hasil survei elektabilitas kandidat calon presiden yang dipublikasi oleh berbagai sumber yang mengantongi tiga nama utama (Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo), terlihat bahwa Pemilu 2024 akan menuai persaingan dan kontestasi politik semakin memanas. Ketiga kandidat ini diprediksi akan menggunakan populisme sebagai strategi memenangkan Pemilu.

Prabowo Subianto yang dikenal telah “memihak” pada kaum petani, nelayan, dan pekerja kecil lainnya akan kembali memainkan narasinya. Anies Baswedan yang memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan menggandeng Gerakan 212 untuk mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama, dapat diprediksi akan melakukan strategi yang sama. Terakhir, Ganjar Pranowo yang dikenal dekat dengan “rakyat kecil”, seperti pengusaha cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang sama dengan Joko Widodo. Inilah yang dikaji dalam artikel ini, yaitu apakah budaya populisme yang muncul di masa depan akan terulang atau bahkan menjadi strategi jitu politik untuk meraih legitimasi dan dukungan suara masyarakat di seluruh Indonesia, di tengah stagnasi politik dan demokrasi yang terjadi di Indonesia? Jika demikian, maka panggung politik di Indonesia akan selamanya didominasi oleh kandidat populis yang setiap masanya akan membawa narasi untuk memecah-belah masyarakat.

Artikel ini memberikan tinjauan kritis dan analitis mengenai keberadaan fenomena populisme yang muncul di Indonesia. Landasan analitis artikel ini adalah bahwa terjadinya fenomena populisme di Indonesia tidak lepas dari dua hal, yaitu (1) Adanya stagnasi dalam politik domestik di Indonesia yang disebabkan oleh

menumpuknya permasalahan sosial yang memerlukan penyelesaian secara cepat juga kurangnya kepekaan masyarakat terhadap berbagai dinamika politik maupun permasalahan sosial yang berlaku, dan (2) Kurangnya kualitas demokrasi dan pengawasan dari pemerintah, hukum, maupun masyarakat sipil serta lembaga lain yang terlibat dalam proses pengawasan demokrasi di suatu negara sehingga menyebabkan suburnya populisme di Indonesia yang diimplementasikan melalui setiap ajang pemilihan umum. Kedua landasan tersebut setidaknya dapat memberikan penjelasan secara mendetail namun mudah untuk diidentifikasi. Rekam jejak keberhasilan populisme sejak Pemilu tahun 2014 yang secara langsung memecah masyarakat yang saling menilai dirinya sebagai “yang paling benar” atau “rakyat yang sesungguhnya” membuat topik ini semakin penting dan relevan untuk dibahas dan diteliti.

Argumen mengenai keberadaan populisme sebagai fenomena dalam dinamika politik suatu negara telah ditinjau sejak lama. Hara (2017) menemukan bahwa populisme yang terjadi di Indonesia dapat memberikan ancaman terhadap demokrasi. Namun, dukungan terhadap demokrasi di Indonesia masih terbilang kuat. Hal ini dibuktikan dengan gagalnya populisme Islam yang dibawa oleh Prabowo Subianto pada masa

Pemilu 2019 (Hara & Trihartono, 2019). Meski demikian, populisme yang pada dasarnya merupakan sebuah protes terhadap keadaan sementara haruslah tetap diawasi oleh demokrasi (Wisnu, 2019). Selanjutnya, Budiman (2021) menyatakan bahwa terlepas dari keberadaan populisme yang berdampak baik atau buruk terhadap demokrasi, perpecahan dan polarisasi masyarakat yang menjadi akibat dari populisme merupakan ancaman yang sesungguhnya dan seharusnya menjadi pemahaman masyarakat sipil. Berbagai penelitian tersebut telah menjelaskan tentang kaitan populisme dengan demokrasi hingga ancaman populisme apabila tidak diawasi oleh demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, ditemukan adanya kekosongan analisis. Tanpa mengesampingkan fakta bahwa kemunculan populisme dipengaruhi oleh konteks politik di suatu negara, penelitian-penelitian sebelumnya kurang bisa menjelaskan konsep populisme secara mendasar yang dapat digunakan sebagai basis analisis yang jelas. Beberapa penelitian sebelumnya juga gagal mengidentifikasi kondisi politik domestik di suatu negara yang menjadi penyebab kemunculan populisme, dimana dalam artikel ini disebutkan bahwa terdapat realita mengenai adanya permasalahan sosial yang menumpuk serta membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan cara memanipulasi situasi politik

menjadi genting. Hal inilah yang menjadi basis argumen kemunculan populisme dalam artikel ini. Oleh karena itu, artikel ini muncul sebagai pengisi kekosongan analisis mengenai penyebab munculnya populisme secara umum dan mengaitkannya dengan konteks Indonesia. Selain itu, artikel ini juga menganalisis kondisi politik domestik Indonesia yang cenderung stagnan, kurang pengawasan terhadap demokrasi, dan adanya aturan hukum yang kurang kuat di tengah maraknya perebutan kekuasaan politik.

Metode yang digunakan artikel ini adalah tinjauan literatur terdahulu dan pengumpulan data dari sumber-sumber kredibel. Tulisan ini meninjau fenomena populisme dalam konteks politik domestik di Indonesia. Karenanya, tinjauan literatur dan pemahaman yang digunakan dalam tulisan ini disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

POPULISME: DEFINISI DAN KONTEKS

Definisi tentang populisme selalu menuai perdebatan di kalangan akademisi. Sejak kemunculannya hingga saat ini, populisme memang dianggap sebagai konsep yang abstrak dan “tidak jelas” (Canovan, 1999). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan konteks dan akibat dari populisme yang diimplementasikan

di negara-negara di dunia (Engesser, Ernst, Esser, & Buchel, 2016). Sebagai contoh, gerakan populis yang muncul di Amerika Latin diidentikkan dengan kemunculan seorang pemimpin karismatik yang mengklaim ada kesalahan pada sistem negara dan mampu memobilisasi massa yang dianggap sebagai rakyat yang sesungguhnya menjadi sebuah gerakan (Kaltwasser, Taggart, Espejo, & Ostiguy, 2017). Hal ini berbeda dengan populisme sayap kanan yang muncul di Eropa Barat, dimana kemunculannya dimotori oleh partai politik sayap kanan yang cenderung memiliki pandangan konservatif mengenai demokrasi (Stanley, 2017). Meski demikian, kentalnya pembawaan identitas kelompok dalam kontestasi politik membuat populisme merupakan strategi yang anti-pluralisme (Madung, 2018).

Berdasarkan pemahaman tersebut, artikel ini berpendapat bahwa populisme merupakan konsep yang derivatif. Populisme perlu disesuaikan dengan konteks politik dan demokrasi di suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai konteks sistem politik dan dinamika demokrasi di Indonesia untuk mendefinisikan populisme yang terjadi. Meskipun demikian, populisme tidak terhenti hanya sebagai fenomena dari dinamika politik

di suatu negara. Tetapi, populisme perlu dipahami sebagai konsekuensi dari berbagai permasalahan sosial di suatu negara. Adapun permasalahan-permasalahan ini kerap kali menjadi permasalahan mendasar, genting, dan membutuhkan perubahan secara cepat sehingga hal ini menjadi justifikasi figur populis untuk melakukan aksi dengan harapan dapat memperoleh reaksi berupa dukungan dan pengakuan politik. Dengan cara itu, figur populis dapat melakukan perubahan-perubahan yang direncanakannya.

Dalam konteks Indonesia, populisme memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Amerika Latin. Yakni kemunculan populisme di Indonesia ditandai dengan munculnya sosok pemimpin yang karismatik dan mampu menggiring opini publik serta menjadikannya “rakyat yang sesungguhnya”. Selain itu, populisme di Indonesia juga kerap kali membawa permasalahan mendasar, seperti kualitas ekonomi yang buruk, pelayanan publik yang tidak maksimal, dan adanya problem-problem yang memerlukan perubahan secara cepat. Populisme di Indonesia tidak terikat dengan ideologi dan spektrum politik tertentu. Hal ini dapat terlihat dari gaya populis Jokowi dan Prabowo yang membawa permasalahan sosial di Indonesia yang tidak mengatasnamakan ideologi tertentu,

ditambah dengan populisme Islam yang dimotori oleh FPI dan dipimpin oleh Rizieq Shihab. Hal ini menjadi keunikan tersendiri dari populisme yang ada di Indonesia.

POLITIK IDENTITAS SEBAGAI PEMANTIK UTAMA

Dinamika politik global semakin mengamini bahwa pengimplementasian demokrasi dapat meningkatkan kualitas politik di suatu negara. Hingga saat ini, banyak negara mengadopsi sistem demokrasi dan politik elektoral. Oleh karena itu, dekade 1970 hingga 2000 dipandang sebagai gelombang ketiga demokratisasi di dunia (Huntington, 1993). Sistem demokrasi dinilai lebih bisa mengakomodasi kepentingan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup suatu negara. Hingga kini, demokrasi dianggap sebagai sistem bawaan suatu negara. Negara-negara non demokratis acap kali dianggap sebagai negara otoriter dan tidak didasari pada kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, sangat penting untuk mempertanyakan mengenai tantangan yang dimiliki oleh sistem demokrasi. Karena sistem demokrasi menjunjung tinggi kebebasan individual, maka tantangan terhadap demokrasi dapat ditinjau

dengan memahami sifat dan kecenderungan dasar manusia.

Menurut interpretasi Marxis, manusia merupakan makhluk yang mengejar keuntungan pribadi. Oleh karena itu, interaksi manusia yang berkonflik digambarkan berdasarkan relasi dan realitas ekonomi (Ainiyah, As'ad, & Mufaridah, 2022). Namun, yang lebih penting adalah pada dasarnya manusia membutuhkan hal-hal nonmaterial lain, yaitu pengakuan akan martabat dan identitas kelompoknya (Fukuyama, 2020). Karena adanya keinginan untuk diakui, kehendak tersebut akan menjelma menjadi kebencian terhadap kelompok lain yang kerap kali berbeda pandangan dengan kelompoknya. Kebencian inilah yang memantik kemunculan pemimpin-pemimpin yang berusaha membangun narasi bahwa kelompoknya telah direndahkan dan dasingkan. Narasi tersebut berlanjut dan menyebar menjadi sebuah tuntutan publik untuk diakui (Fukuyama, 2020). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa politik identitas dan politik kebencian merupakan pembentuk utama dari kemunculan fenomena populisme.

PERJALANAN POPULISME DI INDONESIA

Pada dasarnya, fenomena populisme di Indonesia didorong oleh apa yang disampaikan oleh Fukuyama (2020), yaitu identitas yang membuat adanya haus pengakuan dan narasi kebencian (Shaira, Nurida, & Hidayat, 2021). Indonesia mulai memiliki tren penggunaan politik populis sejak pemilu 2014 yang dimulai oleh Prabowo Subianto dalam kampanye politiknya untuk menjadi presiden. Pada pemilu periode itu, Prabowo Subianto menggunakan strategi populis ultra-nasionalis, sedangkan lawan politiknya, yaitu Joko Widodo menggunakan strategi populisme yang bersifat pragmatis namun dilakukan dengan cara yang lebih halus. Contoh dari tindakan Jokowi pada saat itu ialah menjangkau masyarakat dengan kunjungannya yang disebut “*blusukan*”, dimana beliau mendengarkan berbagai keluhan rakyat dan menawarkan solusi secara langsung dengan memanfaatkan teknologi serta sikap yang anti-konfrontasi. Dibandingkan dengan *image* Jokowi yang dikonstruksikan sebagai pribadi yang sederhana, Prabowo membawa narasi penguatan NKRI dengan mengkritisi program atau pun keputusan pemerintah yang dianggap “melemahkan” Indonesia (Mietzner, 2015). Dengan demikian, stagnasi ekonomi dan berbagai permasalahan rakyat

merupakan hasil dari lemahnya kepemimpinan yang dapat segera diatasi apabila ia terpilih.

Prabowo serta Jokowi pada pilpres sebelumnya bertanding dengan sengit dan memiliki selisih suara yang cukup dekat. Hal ini menjadi mungkin akibat kesamaan fondasi, yaitu digunakannya nasionalisme sebagai alat pembangkit semangat juang masyarakat, namun perbedaan strategi ini menyorot betapa mudahnya bangsainitertarikdengan narasiyangdibangunoleh figur populis. Berbeda dengan populisme yang berkembang di luar negeri, Indonesia tidak menunjukkan perbedaan drastis antara aktor politik yang mendominasi dengan narasi antagonis dengan aktor-aktor yang lain. Hal ini diakibatkan pemimpin karismatik merupakan *image* yang menguntungkan untuk dimiliki aktor politik, dimana mereka memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan. Menurut pengamatan Kurlantzick, antara budaya politik lokal dengan populisme melahirkan *autocrat leaning populist* (Kurlantzick, 2018). Populisme ini memiliki tendensi kuat untuk mengandalkan sifat otoriter dari seorang pemimpin atau pun aktor politik, dimana populisme menjadi alat yang cukup fleksibel dalam usaha memastikan bahwa walaupun aktor tersebut bertindak atas nama rakyat, namun keuntungan dapat tetap didapatkan.

Transformasi yang dipicu oleh Pemilu 2019 silam dapat dilihat di masyarakat Indonesia yang masih terbagi-bagi dalam kelompok pendukung dari calon Presiden dan Wakil Presiden walaupun Pemilu telah lama berakhir. Dengan semangat masyarakat untuk melawan “ketidakadilan”, banyak kritik maupun ujaran kebencian yang bersifat personal kemudian dilontarkan kepada pemerintahan yang sedang menjabat. Hal ini merupakan konsekuensi dari narasi pasangan calon (paslon) yang menggunakan hoaks serta perbedaan dalam masyarakat sebagai alasan untuk menilai baik/buruknya kinerja pemerintahan yang dinilai tidak sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat. Penggunaan massa sebagai bagian dari kampanye dan upaya intimidasi kepada masyarakat sipil juga menjadi bukti dari terjadinya eksploitasi masyarakat. Di dalam kasus ini, paslon akan membangun keyakinan masyarakat bahwa tindakan tertentu harus dilakukan sebagai cara satu-satunya untuk memastikan kepentingan umum dapat terpenuhi. Dengan ini, rakyat akan menyuarakan haknya sebagai warga negara Indonesia sehingga mampu melegitimasi tindakan yang dilakukan sebagai “pengorbanan demi bangsa dan negara” walaupun hal ini tidak mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

POPULISME: EFEKTIVITAS DAN POPULARITAS DI TENGAH STAGNASI POLITIK DAN DEMOKRASI

Populisme dan demokrasi sama-sama mengandung referensi sentral pada kedaulatan rakyat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hubungan timbal balik antara populisme dengan demokrasi. Pendukung populisme mengonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, mereka cenderung mengidentifikasi populisme dengan demokrasi. Selain itu, penentang populisme memegang konsepsi demokrasi yang lebih konstitusional dengan menekankan pentingnya perwakilan, hak-hak individu, dan keseimbangan kekuasaan dan kepentingan. Meskipun populisme dapat menjadi bagian demokrasi yang berpotensi berbahaya, populisme juga berfungsi sebagai sebuah kekuatan dalam memajukan demokrasi dalam sistem demokrasi. Populisme telah dianalisis sebagai sarana untuk mengungkap dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang dilanggar dari sistem perwakilan. Populisme dapat mengganggu rakyat dan mencegah penutupan sistem politik formal.

Keefektifan populisme di suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya

dinamika dan kompleksitas politik, ekonomi, agama, ras, suku, dan budaya yang ada di negara tersebut. Dinamika dan kompleksitas tersebut kemudian menjadi lahan kesempatan bagi para calon pemimpin untuk mendapatkan dukungan suara. Seperti halnya yang terjadi di Amerika, dimana populisme masih eksis terbukti dari terpilihnya Donald Trump dan Mike Pence sebagai pasangan kandidat presiden dalam pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2016. Pemilu tersebut cenderung mengarah kepada kemenangan politikus sayap kanan dengan membawa kebijakan nasionalis dan anti-imigran. Kecenderungan sesuai dengan ambisi dan nilai-nilai yang dianut oleh Donald Trump, yakni *make America great again*.

Selain itu, populisme juga membatasi ruang gerak dari berbagai kompleksitas yang ada, seperti politik, ekonomi, agama, ras, suku, dan budaya sehingga demokrasi yang sejati mulai kehilangan identitas dalam implementasinya. Indikator bentuk populisme sayap kanan tersebut semakin menjamur di negara-negara demokratis lainnya, seperti Brazil, Italia, termasuk Indonesia di Kawasan Asia. Fossati & Mietzner (2019) mencatat bahwa populisme di Indonesia telah populer sejak masa kepemimpinan presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia. Gaya yang

digunakan Soekarno saat berorasi di hadapan rakyat Indonesia membawa narasi populisme dasar dengan menyinggung penderitaan rakyat akibat adanya imperialisme dan kolonialisme. Menurut Fossati dan Mietzner, gaya tersebut diadopsi oleh salah satu calon presiden Indonesia 2014, yakni Prabowo.

Prabowo yang mengusung narasi adanya sistem yang anjlok dan merugikan kalangan menengah ke bawah, khususnya para petani yang tidak diperhatikan kesejahteraannya hingga dikaitkan dengan adanya intervensi asing yang memperparah keadaan, Prabowo menjadikan dirinya sebagai tameng bagi mereka yang diabaikan. Joko Widodo mengusung narasi yang lebih luwes, ia memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang lebih inklusif dan cinta damai (Mietzner, 2015). Walaupun gaya dan konteks yang dibawa oleh kedua kandidat calon presiden berbeda, namun hasil akhir dari keduanya sama, yakni menarik dukungan pemilih yang memersepsikan diri mereka termarginalkan oleh kelompok elite. Namun, apabila budaya populisme ini terus-menerus dilestarikan, maka dampak yang muncul adalah degradasi demokrasi.

Dalam menjelaskan bahasan ini, kebangkitan gerakan populis dalam sistem demokrasi perlu dipahami berdasarkan sifat paradoks demokrasi

konstitusional (Canovan, 1999). Setidaknya, terdapat dua model yang dapat menjelaskan keberadaan sifat paradoks dari demokrasi konstitusional, dimana menurut model ini demokrasi konstitusional diartikan sebagai kombinasi yang sulit dari pilar konstitusional dan demokrasi. Kedua pilar tersebut dicirikan dengan pikiran mereka yang tidak kompatibel, yang diuraikan dalam dua teori politik, yaitu teori pilar liberal dan teori pilar demokrasi.

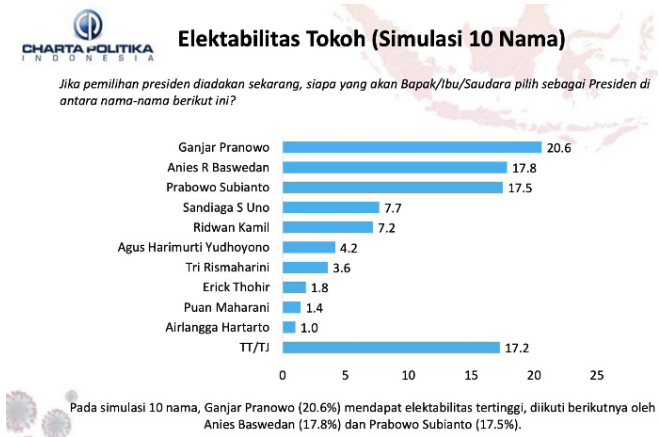
Pilar liberal mengacu pada tradisi liberal yang menekankan dan mengklaim bahwa otoritas tertinggi di negara berada di tangan hukum yang ditujukan untuk melindungi hak-hak individu dan warga negara. Oleh karena itu, kekuasaan yang berada di tangan elite politik dibatasi melalui serangkaian *checks and balances* yang bersifat universal, yaitu menekankan pada kesetaraan hak individu tanpa memandang bulu. Pilar demokrasi menekankan bahwa aturan hukum merupakan alat yang “mempromosikan” demokrasi. Dalam hal ini, legitimasi politik memberikan otoritas tertinggi bukan pada hukum melainkan pada rakyat. Dengan kata lain, pilar demokrasi terfokus pada kehendak rakyat karena model kedaulatan rakyat bersifat partikularistik yang mengedepankan kehendak mayoritas dan melawan kehendak minoritas. Karenanya, hal tersebut

memungkinkan pemerintahan demokrasi oleh rakyat sering mengalami reformasi konstitusional.

Dari dua model teori politik tersebut menunjukkan bahwa kebencian populis yang muncul ketika demokrasi konstitusional dianggap tidak seimbang dalam mendukung pilar konstitusional yang terlalu banyak proses “*checks and balance*” dan gagasan bahwa perwakilan yang terpilih—tidak dapat disentuh oleh rakyat. Kemudian, populisme menyuarakan keinginan untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dengan mengacu pada pilar demokrasi konstitusional, menantang demokrasi konstitusional, dan mengklaim untuk mewujudkan janji-janji demokrasi yang bertentangan dan menekankan perlunya demokrasi yang lebih murni. Dalam perwujudannya, dua model ini mengacu pada ketegangan paradoks antara ideologi dan praktik demokrasi. Ideologi demokrasi dipenuhi dengan tema populis, yaitu menekankan kedaulatan terhadap akomodasi mayoritas dengan melawan minoritas. Selain itu, transparansi terhadap prosedur yang rumit namun mencoba untuk menghasilkan kebijakan inklusif yang dipengaruhi oleh partisipasi seluruh warga negara serta mengklaim untuk menggabungkan cita-cita demokrasi dengan praktik yang mempercayakan kepentingan mereka kepada pemimpin yang dipilih secara langsung.

MENUJU PEMILU 2024: MEMANASNYA KONTESTASI POLITIK DI INDONESIA

Tak dapat dipungkiri, bekas keberhasilan strategi populis yang dilakukan pada Pemilu 2019 meninggalkan bekas dalam dinamika politik Indonesia. Kali ini, perbedaannya adalah hasil survei elektabilitas calon presiden 2024 yang menunjukkan akan ada tiga nama utama yang digadang menjadi kandidat presiden.



Survei Elektabilitas Calon Presiden 2024

Berdasarkan hasil survei elektabilitas calon Presiden 2024, terdapat tiga nama teratas yang memiliki potensi terbesar untuk menjadi kandidat presiden. Namun, seperti yang dijelaskan pada pendahuluan, ketiga nama potensial ini memiliki rekam jejak yang berpotensi melahirkan gelombang dan strategi populisme baru

dalam Pemilu 2024. Hal ini seharusnya menjadi tinjauan dan peringatan bagi masyarakat sipil dan juga pemerintah untuk melakukan pengawasan penuh supaya akibat buruk dari “pesta demokrasi” dapat dibendung.

Dengan semakin populernya penggunaan politik identitas oleh aktor-aktor politik, mengakibatkan rapuhnya rasa persatuan bangsa Indonesia. Pada awalnya, negara ini merupakan negara plural yang menjadi surga dari beragam suku, agama, serta golongan yang saling melengkapi serta menyeimbangkan satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, perdamaian ini berulang kali diuji dengan meluapnya ketidakpuasan salah satu kelompok masyarakat. Hal ini menjadi bahan dari strategi promosi diri yang akan dimanfaatkan oleh banyak pihak dengan menunjukkan bahwa mereka bersimpati dan mendukung gerakan tersebut atas nama keadilan. Dibandingkan dengan faktor lainnya, agama dan ras merupakan topik sensitif yang memisahkan masyarakat dan menjadi tolok ukur seseorang untuk menilai individu lainnya.

Apabila masyarakat telah mulai mengotakotakkan seseorang berdasarkan label “elite” dan “rakyat biasa”, maka dapat dipastikan bahwa moral seseorang dinilai berdasarkan apa suku, ras,

agama, atau pun status sosial individu tersebut. Pemikiran semacam ini sangat memungkinkan adanya eksploitasi yang telah dijelaskan sebelumnya, demi keuntungan golongan/aktor politik tertentu. Contohnya yang terjadi di Indonesia adalah saat menguatnya narasi anti-Tionghoa dan non-muslim yang berhasil dimanfaatkan dengan diberi muatan populisme Islam untuk menjatuhkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2016. Peristiwa jatuhnya mantan gubernur Jakarta ini berkaitan dengan dakwaan penistaan agama Islam, namun reaksi massa yang sangat besar membuat banyak pihak merasa terkejut. Sebab dari keterkejutan ini adalah penistaan agama bukanlah kasus yang langka di Indonesia sehingga Aksi Bela Islam (ABI) 411 serta 212 terbukti merupakan hasil koordinasi sejumlah ormas Islam yang dikepalai oleh ormas Front Pembela Islam (FPI) untuk menekan keputusan pengadilan agar memenjarakan Ahok (BBC Indonesia, 2021).

Kepemimpinan Jokowi sebagai presiden periode kedua memungkinkan beliau untuk membasmi akar-akar radikalisme serta pihak-pihak yang memopuleri populisme Islam. Salah satu tokoh ormas terkenal, yaitu ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berhasil didakwa dan dipenjara, serta pembubaran FPI dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), merupakan bentuk usaha

Jokowi dalam mengendalikan ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila (BBC Indonesia, 2021). Namun, tindakan ini juga tidak tanpa konsekuensi, dimana sebagian kecil dari masyarakat Indonesia melihat tindakan tersebut sebagai tindakan represif dan merasa termarginalisasi oleh kabinet yang sedang menjabat. Maka, berangkat dari respons masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi, telah banyak pihak memberikan prediksinya akan penerus kursi kepresidenan setelah masa jabatan beliau berakhir di tahun 2024 mendatang. Prediksi ini mendiskusikan tentang apakah tindakan penanggulangan radikalisme serta populisme Islam oleh Jokowi telah berhasil atau tidak, dan apakah di tahun 2024 mendatang kejadian pemilu 2019 lalu akan terulang kembali. Hal ini menimbulkan berbagai pendapat bermunculan karena loyalis dari organisasi-organisasi berbasis agama yang telah dibubarkan tidak bisa memastikan adanya perubahan *mindset* atau pun keberpihakan anggota-anggota tersebut. Dengan digadag-gadangnya Prabowo sebagai calon presiden pada tahun 2024, kemungkinannya sangat tinggi bahwa strategi populisme Islam maupun etnis akan kembali dipopulerkan karena memiliki pengaruh besar pada popularitas serta elektabilitas paslon.

Mendekati Pemilu 2024, banyak pihak telah memulai melakukan promosi diri atau pun melakukan strategi-strategi khusus demi membangun *image* yang dibutuhkan seorang pemimpin bangsa (Tamimi, 2020). Terutama, ketika Indonesia harus bertahan menghadapi pandemi virus Covid-19 yang terus bermutasi, maka banyak aktor politik yang sedang/akan menjabat memanfaatkan penderitaan serta duka masyarakat itu dan memanipulasi target emosi tersebut kepada kabinet yang saat ini sedang menjabat menggunakan *political branding*. Taktik ini digunakan paslon untuk menjadikan dirinya dikenal dengan “*branding*” atau pun kesan yang unik sehingga pemilih akan tertarik dan bahkan setuju dengan retorika narasi yang diusung oleh paslon tersebut.

Seperti disadari bahwa setelah pemilihan umum 2019 lalu, perpolitikan Indonesia belum berkembang menuju arah positif yang seharusnya. Hal ini selain diakibatkan oleh sisa populisme pasca pemilu, namun juga kurangnya keinginan partai politik Indonesia untuk mengeksplorasi politik di luar zona nyaman dengan mengajukan calon-calon yang jelas membuat pesta politik yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat serta para kontestan menjadikan pemerintahan kurang mendapat kepercayaan rakyat. Tentunya masyarakat akan mampu

melihat kandidat yang berkualitas maupun yang kurang berkualitas. Namun, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kedekatan calon tertentu dengan kelompok masyarakat atau kalangan tertentu. Terjadinya stagnasi dalam politik secara umum akan membuat masyarakat kurang bebas menyuarakan aspirasinya karena rasa cemas atau pun pasrah bahwa calon-calon yang akan berkontestasi dalam memperebutkan kursi pemerintahan tampaknya bukan berasal dari “rakyat” melainkan elite politik pada umumnya. Apabila tidak segera ditangani, peristiwa ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan serta dukungan masyarakat sipil terhadap pemerintahan yang berkuasa dan menimbulkan banyak masalah, seperti kekacauan massal, semakin dalamnya perpecahan, hingga stagnasi ekonomi.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka Pemilu 2024 sangat menentukan perpolitikan Indonesia ke depannya, apakah kali ini penggunaan strategi populisme serta *political branding* dengan berbagai isu agama dan suku akan terulang kembali atau tidak. Namun, melihat beberapa nama yang telah banyak diminati oleh rakyat Indonesia berdasarkan survei elektabilitas capres, maka tiga nama dengan peminat terbanyak adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Berkaca dari rekam

jejak ketiga nama itu, dua aktor (Prabowo Subianto & Anies Baswedan) merupakan tokoh yang memiliki kedekatan kontroversial dengan eks-ketua FPI, yaitu Rizieq Shihab serta loyalisnya di Pemilu sebelumnya. Sementara, Ganjar Pranowo dinilai memiliki gaya kepemimpinan yang “merakyat” dan mampu berbaaur bersama “rakyat kecil”, sebuah karakter yang dapat kita rasakan lewat kepemimpinan Joko Widodo. Dengan demikian, cukup aman untuk menyatakan bahwa kemungkinan terbesar untuk semakin parahnya penggunaan populisme di Indonesia akan terjadi pada pemilu 2024 mendatang.

KESIMPULAN

Kondisi sosial politik domestik di Indonesia diwarnai dengan berbagai permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Berbagai permasalahan ini menyebabkan adanya stagnasi politik, mulai dari kurang efektifnya kebijakan hingga anggapan bahwa penguasa tidak bisa memenuhi kehendak rakyat. Selain itu, kurang baiknya kualitas demokrasi di Indonesia yang ditandai oleh rendahnya *check and balances* dari berbagai institusi mulai dari kelompok oposisi, NGO, dan *civil society* telah menyebabkan populisme dapat bertumbuh secara subur sebagai konsekuensi dalam dinamika

elektoral. Dalam hal ini, kondisi bangsa Indonesia yang multi-identitas kerap kali menjadi sasaran empuk bagi para kandidat pemimpin untuk menyuarakan narasi perlawanan dengan cara yang memecah-belah. Apabila kondisi politik seperti ini dapat “membudaya” dalam artian berjalan tanpa pengawasan yang ketat dari aturan hukum dan demokrasi itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa sampai kapan pun kondisi politik akan penuh dengan narasi kebencian yang menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kondisi politik yang dinamis, demokrasi yang ideal disertai pengawasan yang ketat dari berbagai pihak.

REFERENSI

- Ainiyah, N., As'ad, & Mufaridah, H. (2022). Agama, Ekonomi, dan Perubahan Sosial “Refleksi Pemikiran Karl Marx” tentang Kondisi Agama dan Sosial Ekonomi Indonesia. *Jurnal Komunikasi & Konseling Islam*, 4 (1), 39–47.
- Budiman, B. N. (2021). Populisme di Indonesia Sebagai Ancaman Polarisasi Masyarakat. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1 (2), 235–246.
- Canovan, M. (1999). Trust The People!: Populism and The Two Faces of Democracy. *Political Studies*, 47 (1), 3–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-9248.00184>.
- Engesser, S., Ernst, N., Esser, F., & Buchel, F. (2016). Populism and Social Media: How Politicians Spread a Fragmented Ideology. *Journal of Information, Communication & Society*, 1–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2016.1207697>.
- Fossati, D., & Mietzner, M. (2019). Analyzing Indonesia's Populist Electorate. *Asian Survey*, 59 (5), 769–794. <https://doi.org/https://doi.org/10.1525/as.2019.59.5.769>.

- Fukuyama, F. (2020). *Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian* (Cetakan Pertama; E. Saputra & N. Intan, eds.). Yogyakarta: Bentang.
- Hara, A. E. (2017). Populism in Indonesia and its Threats to Democracy. *Advances in Social Sciences, Education, and Humanities Research (ASSEHR)*, 129, 106–111.
- Hara, A. E., & Trihartono, A. (2019). The Failure of Islamic Populism: The Case of Indonesia's 2019 Election. *339 (Aicosh)*, 259–263. <https://doi.org/10.2991/aicosh-19.2019.59>.
- Hilmy, M. I. (2020). Fenomena Gerakan Populisme dalam Kemunduran Demokrasi. *Jurnal Civic Hukum*, 5 (2), 145–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13080>.
- Huntington, S. P. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Vol. 4)*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Kaltwasser, C. R., Taggart, P., Espejo, P. O., & Ostiguy, P. (2017). Populism: An Overview of the Concept and the State of the Art. In C. R. Kaltwasser, P. Taggart, P. O. Espejo, & P. Ostiguy (Eds.). *The Oxford Handbook of Populism* (First Edit, pp. 12–43). United Kingdom: Oxford University Press.

Madung, O. G. (2018). Populisme, Krisis Demokrasi, dan Antagonisme. *Jurnal Ledalero*, 17 (7), 58–76.

Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. (2015). East-West Center. <http://www.jstor.org/stable/resrep06525>

Perdana, A. A. (2019). Populisme Kanan, Islam, dan Konteks Indonesia. *Jurnal MAARIF*, 14 (1), 29–42.

BBC. (2021). Rizieq Shihab Divonis Empat Tahun Penjara: Pengaruhnya “Makin Melemah” atau Menunggu “Peran” saat Pilpres 2024? (2021, May 27). *BBC News Indonesia*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57239389>.

Shaira, R. E., Nurida, T. D., & Hidayat, R. (2021). Populisme dan Intoleransi dalam Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Digital Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3 (1), 43–52. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.51>.

Stanley, B. (2017). Populism in Central and Eastern Europe. In C. R. Kaltwasser, P. Taggart, P. O. Espejo, & P. Ostiguy (Eds.). *The Oxford Handbook of Populism* (First Edit). United Kingdom: Oxford University Press.

Tamimi, C. (2020). *Political Branding di Masa Pandemi*. Media Indonesia. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/opini/342658/political-branding-di-masa-pandemi>

Wisnu, D. (2019). *Populisme, Politik Identitas, dan Erosi Demokrasi di Abad Ke 21: Refleksi dari Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali 2018*. D. Wisnu (ed.). Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

